



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR WAJIB UJI (KBWU) DALAM PENINGKATAN JUMLAH
KENDARAAN WAJIB UJI DI KOTA PEKALONGAN**

TESIS

Disusun Oleh

VENI OMI HARTINI

NIM : 221003631010586

Program Studi : Magister Administrasi Publik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SEMARANG

2023

LEMBAR PERSETUJUAN



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI (KBWU) DALAM PENINGKATAN JUMLAH KENDARAAN WAJIB UJI DI KOTA PEKALONGAN

VENI OMI HARTINI
NPM : 221003631010586
Program Studi : Magister Administrasi Publik

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik, Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Program Studi pada tanggal tertera di bawah ini,
Semarang, September 2024

Menyetujui

Pembimbing 1

Prof. Dr. Rini Werdiningsih, MS
NIDN 0621105901

Pembimbing 2

Dr. Indra Kertati, M.Si
NIDN 0601086401

Menyetujui

Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik

Dr. Tri Lestari Hadiati, M.Si
NIDN 0618056501

LEMBAR PENGESAHAN



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI (KBWU) DALAM PENINGKATAN JUMLAH KENDARAAN WAJIB UJI DI KOTA PEKALONGAN

VENI OMI HARTINI

NPM : 221003631010586

Program Studi : Magister Administrasi Publik

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik, Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui Tim Penguji dan disahkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal tertera di bawah ini, Semarang, 2024

- 1 Prof. Dr. Rini Werdiningsih, MS
NIDN 0621105901
Ketua Tim Penguji
- 2 Dr. Indra Kertati, M.Si
NIDN 0601086401
Penguji 1
- 3 Dr. Aris Toening Winarni, M.Si
NIDN 0603116402
Penguji 2

.....

.....

.....

Mengesahkan
Dekan FISIP UNTAG SEMARANG

Prof. Dr. Rini Werdiningsih, MS
NIDN 0621105901



ABSTRAK

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan kendaraan bermotor harus mampu menjamin daya jangkau dan pelayanan dengan memperhatikan keselamatan umum, kelestarian lingkungan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sendiri sebagai pemeriksaan kondisi kendaraan apakah kendaraan tersebut persyaratannya layak darat atau tidak, termasuk kelengkapan kendaraan bermotor terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah lewat dinas terkait yang diberi kewenangan sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang pengujian kendaraan bermotor. Kendaraan yang wajib melaksanakan pengujian kendaraan bermotor yaitu angkutan barang seperti truk, mobil pick up dan kereta gandengan selanjutnya kendaraan angkutan penumpang yaitu bus, minibus dan taksi serta kendaraan sejenisnya diseluruh wilayah Kota Pekalongan.

Implementasi kebijakan merupakan bagian penting dari proses kebijakan, dimana pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur melalui capaian dan indikator yang telah ditetapkan. Peraturan daerah tersebut menetapkan hak pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan tujuan memastikan implementasi kebijakan yang sesuai dengan regulasi dan pedoman yang ditetapkan, melalui implementasi yang tepat sasaran maka kebijakan ini diharapkan memberi kontribusi positif dalam mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas wilayah Kota Pekalongan.

Dengan menetapkan tujuan yang jelas, regulasi yang terstruktur, serta prosedur pengujian, kebijakan tersebut dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan lebih ramah lingkungan. Dalam memahami isi kebijakan dan implementasi pengujian kendaraan bermotor, terdapat beberapa teori yang relevan. Teori Merilee S. Grindle yang digunakan membantu menganalisis bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Konten Kebijakan, Konteks Implementasi